

344.046

HAR

S

1995

SANKSI PIDANA DALAM MASALAH LINGKUNGAN



OLEH :

UNTUNG SRIHARDJANTO, SH

NIP. 131 689 626

**MAKALAH SEBAGAI BAHAN DISKUSI JURUSAN HTN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
BULAN JANUARI 1995**

SANKSI PIDANA DALAM MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

I. PENDAHULUAN

Naiknya suhu bumi tiap 0,3 derajat per-tahun, bertambah luasnya perairan laut, dan semakin besarnya lubang Ozon di Kutub Selatan, merupakan masalah sentral dalam lingkungan hidup dimana manusia mulai menyadari bahwa dalam hidup dan kehidupan manusia di bumi, ternyata telah merusak dan menurunkan kualitas lingkungan hidup manusia itu sendiri.

Menyadari akan bahaya yang mengancam kehidupan umat manusia itu, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) pada tanggal 11 - 13 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi PBB yang lebih dikenal dengan KTT Bumi ini menghasilkan Deklarasi Rio, dimana dalam Agenda-21 memuat antara lain keraja sama internasional untuk mengakselerasi pembangunan berkelanjutan di negara berkembang dan kebijaksanaan dalam negeri yang berkaitan dengan itu, melawan kemiskinan, mengubah pola konsumsi, dinamika demokrasi dan kesinambungan, menjaga dan meningkatkan kondisi perumahan dan pemukiman, serta mengintegrasikan lingkungan dan pembangunan dalam pengambilan keputusan.

Indonesia sebagai anggota PBB dan sebagai salah satu negara berkembang, telah menyadari akan pentingnya lingkungan hidup ini bagi terpeliharanya kualitas lingkungan dan sebagai perwujudan tanggung jawab masa depan

bagi kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Hal ini telah direalisasikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara 1982 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 3215.

Sebagai satu kebijakan yang berspektrum luas, maka undang-undang ini, menggunakan sistem sanksi yang terdiri dari :

- a. Administratif
- b. Keperdataan dan
- c. Keadanaan

Sistem sanksi kepidanaan sendiri dalam undang-undang tersebut hanya ditetapkan dalam satu pasal, ialah pasal 22 yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- (3) Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Dari isi pasal 22 tersebut di atas, maka jelaslah bahwa untuk merusakkan lingkungan yang dilakukan dengan sengaja, maka terhadapnya diancam pidana 10 (sepuluh) tahun dengan kemungkinan dikumulasikan dengan denda yang cukup besar, yaitu seratus juta rupiah.

Untuk perbuatan ini, disyaratkan unsur kesengajaan dan dikualifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini. Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka hal ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dengan kemungkinan kumulasi dengan denda sebanyak-banyaknya satu juta rupiah.

II. PERMASALAHAN

Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan merupakan hal yang sulit untuk dikoreksi, termasuk segala bentuk kehidupan yang ada, maka hal ini menimbulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Hal apa yang paling dominan dalam penentuan kebijakan mengenai lingkungan hidup ? ;
2. Sejauh mana sanksi pidana mampu berperan dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup ?.

III. PEMBAHASAN

Sebelum membahas kedua pokok permasalahan di atas, ada baiknya kita lihat pada kenyataan sejarah kehidupan

umat manusia, dimana masalah lingkungan hidup ini muncul setelah era industrialisasi pada awal abad ke-19.

Era industrialisasi ini merupakan loncatan kemajuan teknologi yang dihasilkan manusia, karena dengan kemajuan teknologinya manusia berusaha mencapai tingkat kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Akan tetapi hal itu membuat manusia lupa daya dukung yang terbatas dari bumi ini.

Sebenarnya, sebelum era industrialisasi ini terjadi, kehidupan manusia lebih didominasi dengan cara - cara yang bersifat agraris. Kehidupan manusia yang bersifat agraris ini ternyata selalu memperhitungkan daur ulang, sehingga kelestarian lingkungan selalu terjaga.

Sebaliknya sejak umat manusia mampu memanipulasi hukum alam dengan penemuan mekanik, industri kimia, dan bentuk-bentuk industri fisika, maka sifat dasar dari aktivitas manusia berubah menjadi bersifat eksploitatif. Hal inilah sebenarnya merupakan awal dari kerusakan lingkungan hidup di bumi ini.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita, sebenarnya secara tersamar telah menentukan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup di bawah Bab VII dengan judul : " Tentang Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang ".

Adapun pasal-pasal yang dimaksud , ialah :
pasal 187 (sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan ,

atau banjir, Pasal 188 (kealpaannya menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir), Pasal 191 (menghancurkan bangunan untuk menahan atau menyalurkan air), Pasal 202 (memasukkan barang yang berbahaya dalam sumber air untuk umum), dan sebagainya.

(Muladi : "Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Makalah, halaman 4).

Demikian pula dengan perundang-undangan yang tersebar di luar kodifikasi, misalnya Ordonansi Gangguan, dan lain-lain. Akan tetapi kalau kita jujur, maka pemikiran pembentuk undang-undang pada waktu itu ialah dengan tujuan melindungi kepentingan hukum yang terkait, karena hal itu sesuai dengan konsep pemikiran barat yang bersifat kontraktual.

Masalah lingkungan hidup itu sendiri bersifat holistik, lebih luas daripada pemikiran partial untuk kepentingan golongan-golongan atau aspek-aspek tertentu saja.

Maka untuk menjawab permasalahan pertama, kita harus kembali pada sebab-sebab kerusakan lingkungan hidup itu serta bagaimana kebijakan yang menyeluruh terhadap arah pembangunan nasional yang akan dilaksanakan serta skala prioritas yang ditentukan.

Oleh karenanya terjadinya kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini ternyata dari undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA), yang karena bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap para Investor/Kapitalis, maka segera undang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif.

Oleh karena itu, hal yang paling dominan dalam penentuan kebijakan tentang lingkungan hidup, banyak dipengaruhi oleh arah dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Bila kita tinjau kembali Pasal 22 Undang-undang No 4 Tahun 1982, maka unsur-unsur perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, ialah :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- (3) Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Apabila kita perinci dari perumusan pasal di atas, maka yang disebut sebagai tindak pidana terhadap lingkungan hidup ialah perbuatan seseorang yang :

- a. dengan sengaja/kelalaiam
- b. menyebabkan rusaknya lingkungan hidup

Dengan demikian dapat kita lihat, bahwa pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana terhadap lingkungan hidup sebagai tindak pidana materiil, artinya rusaknya lingkungan hidup merupakan syarat untuk adanya delik ter-

sebut. Hal inilah sekiranya yang menimbulkan kesulitan di dalam penerapannya, karena untuk dapat dipidana harus terbukti akibat adanya kerusakan lingkungan hidup.

Dalam hal menentukan kriteria dari kerusakan lingkungan hidup inilah yang sulit dibuktikan oleh alat negara penegak hukum, karena mengingat harus adanya bukti hubungan langsung antara perbuatan seseorang tersebut dengan rusaknya lingkungan hidup.

Sebagai contoh ialah kasus lingkungan hidup di Sidoardjo, Jawa Timur di man kasus tersebut dalam proses persidangan mengalami kesulitan akibat dari tidak adanya standarisa - si/ukuran/kriteria yang baku untuk membuktikan tingkat polusi pada sungai yang dikatakan sudah tercemar itu.

Kasus contoh yang lain adalah kasus pabrik kertas - Plywood di Sumatera Utara yang pernah menggegerkan, ternyata tetap jalan dan dinyatakan sebagai tidak membahayakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, untuk menghindari kesulitan dalam penrapan Pasal 22 di atas, diperlukan perubahan perumusan dari undang-undang tersebut di atas dari delik materiil menjadi delik formil. Untuk mengadakan perubahan dari delik materiil ke delik formil diperlukan suatu kebijakan legislatif dalam penegakan sanksi kepidanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982.

Untuk tindak pidana lingkungan hidup, kebijakan legislatif mengenai penegakan sanksi pidana yang dapat diidentifikasi adalah :

a. Sanksi pidana yang digunakan berupa pidana penjara, kurungan, dan denda.

Jadi hal ini berbeda dengan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (TPE) yang menganut "double track system", UU No. 4/1982 sama sekali tidak menyebut-nyebut jenis sa sanksi yang berupa tindakan tat tertib. Walau demikian , dalam Pasal 20 diatur pula sanksi keperdataan berupa :

- a.1. kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita ;
2. pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Mengenai pelaksanaan kedua jenis sanksi keperdataan di atas, masih akan diatur dalam peraturan perundang - undangan. Kedua jenis sanksi keperdataan di ats merupakan bentuk-bentuk restitusi dan kompensasi yang sebenarnya sudah tidak asing lagi sebagai bentuk-bentuk sanksi pidana yang dimasukkan dalam jenis pidana tambahan atau tindakan malahan dalam berbagai konggres PBB mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders sering dinyatakan bahwa hak-hak korban (antara lain untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi) harus dilihat sebagai bagian yang integral dari keseluruhan sistem penegakan hukum pidana (menurut istilah konggres PBB ke-7 itu disebut sebagai ; "an integral aspect of the total criminal justice system").

Dengan mengemukakan hal-hal di atas, ingin ditekan kan betapa pentingnya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dengan penegakan sanksi kepidanaan terhadap

pribadi maupun korporasi yang melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Hal ini sangatlah wajar, mengingat dimensi, ruang lingkup dan dampak dari tindak pidana terhadap lingkungan hidup itu sangatlah luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Terlebih telah diakui bahwa kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan punahnya peradaban manusia dan seluruh makhluk dan tumbuhan di bumi ini.

Tugas untuk menjaga dari rusak dan kelestarian lingkungan hidup pada dasarnya menjadi tanggung jawab setiap orang di bumi ini, dan tidak melulu menjadi tugas pemerintah atau suatu negara tertentu saja. Dalam rangka memperbaiki kerusakan dan melestarikan lingkungan hidup tidak sedikit dana yang dibutuhkan, dana tersebut sebenarnya sudah terpenuhi apabila pemerintah/negara mengurangi dana untuk pembuatan alat pembunuh dan penghancur massal dialokasikan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan dan menjaga kelestariannya, dan yang terlebih penting dalam keberhasilan mengatasi kerusakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka sanksi kepdanaan tidak perlu digunakan untuk menderitakan pelanggarnya.

IV. KESIMPULAN

1. Hal yang dominan dalam penentuan kebijakan tentang lingkungan hidup ternyata banyak dipengaruhi oleh arah dan tujuan pembangunan nasional itu sendiri ;

2. Perumusan perbuatan sebagaimana Pasal 22 Undang - undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan delik materiil, sehingga sulit untuk menentukan kriteria dari kerusakan lingkungan hidup ;
3. Masalah lingkungan hidup bermula dari adanya perubahan pola kehidupan masyarakat agraris menjadi industrialis yang bersifat eksploitatif ;
4. Pembangunan tanpa merusak lingkungan hendaknya bukan sekadar slogan saja, tetapi diperlukan perhatian , pengawasan dan penegakan hukum yang sungguh-sungguh atas pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, khususnya oleh lembaga/instansi yang diserahi untuk itu.

KEPUSTAKAAN

Soeroso, Tjipto, Kuliah : Hukum Pidana Khusus, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1990).

KTT Bumi Berakhir, Masalah Finansial terselesaikan, (Jakarta : Harian Kompas, 15 Juni 1992).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982).